

Ratusan Warga Miskin di Kelurahan Tomang Belum Dapat BLT BBM

JAKARTA (IM) - Ratusan warga miskin di Kelurahan Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, belum terdata mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengalihan subsidi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp600.000. BLT BBM ini merupakan kompensasi dari pemerintah terkait dengan kenaikan BBM tersebut.

Salah satunya yakni Susana, wanita yang tinggal di RT 006 RW 013 ini mengaku belum mendapatkan bantuan subsidi BBM. Padahal, dirinya sangat berharap, di tengah kondisi yang sulit ini, pemerintah mau memberikan bantuan.

"Saya kurang ngerti (BBM naik lagi). Tambah susahlah saya mah," ujarnya di Jakarta, Jumat (16/9). Ibu yang bekerja sebagai pemulung ini pernah menanyakan perihal bantuan BBM subsidi ke pihak RW setempat. Namun, pihak RW setempat mengatakan, dirinya belum terdaftar sebagai Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Ada warga yang ekonominya lebih lumayan (darinya). Dia dapat. Makanya saya bingung, yang situ dapat, saya kagak. Suka sedih pak," ungkapnya. Ketua RW 013, Nanang Kurniawan mengatakan, belum semua warga terdaftar sebagai penerima BLT Subsidi BBM. Dia mengatakan, baru sekitar 400 warganya yang telah terdaftar. Itu pun yang sebelumnya terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Yang sudah dapat undangan dari Kemensos dan pos giro, ada 125 yang mendapatkan BLT seharga Rp600.000. Sisanya yang belum masih banyak. Kalau di data sekitar 400-an," katanya. Nanang mengaku pihaknya akan memberikan informasi ke kelurahan setempat terkait data warga miskin yang belum terdaftar atau belum menerima. "Kalau di kita (125 terdaftar) sudah cair seminggu lalu kok. Tapi kapan waktu dari

pemerintahnya untuk cairnya sih enggak jelas," tuturnya. Nanang berharap, dengan adanya kebijakan kenaikan BBM ini, pemerintah tak memberikan banyak syarat untuk membantu seluruh warga miskin. Seperti halnya saat memberikan bantuan Covid-19 beberapa waktu lalu.

"Kalau Covid kemarin enggak ada kriteria (prasyarat), semua dapat. Kepengin kita sih BLT ini kita dapat semua," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat mendata sebanyak 69.857 warga mendapatkan BLT pengalihan subsidi kenaikan harga BBM sebesar Rp600.000. "Itu (yang mendapat bantuan) penerima PKH (Program Keluarga Harapan) dan penerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) Jadi sasaran penerimaannya itu," kata Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Barat, Suprpto kepada wartawan, Selasa (13/9).

Suprpto menjelaskan, pencairan dilakukan dalam rentang waktu empat bulan yakni pada September hingga Desember 2022. Para penerima manfaat akan mendapatkan dana bantuan Rp300.000 sebanyak dua kali, sehingga total yang diterima adalah sejumlah Rp600.000.

"Tahap satu dibagikan di bulan September untuk dua bulan (September dan Oktober) sebesar Rp300 ribu. Tahap dua bulan (November dan Desember)," jelasnya.

Adapun BLT subsidi BBM sebesar Rp600.000 tersebut akan disalurkan Kemensos dan bisa diterima lewat Kantor Pos Indonesia oleh setiap penerima manfaat.

Suprpto memastikan, pihaknya akan memonitoring agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran. Salah satunya dengan mendatangi pintu ke pintu setiap warga penerima manfaat. "Door to door (datangi pintu ke pintu), melalui RT RW ataupun langsung ke kantor pos, kita ya monitoring saja melaporkan ke Dinas hari ini sudah berapa disalurkan begitu," pungkasnya. ● yan

Sanksi Administrasi Pajak Daerah Dihapus sampai 15 Desember

JAKARTA (IM) - Masyarakat di wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu diimbau untuk memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah. Hal itu diungkapkan Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Bambang Eko P kepada wajir pajak (WP).

Menurut Bambang, kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah ini telah dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan berlaku mulai 15 September 2022 hingga 15 Desember 2022. "Ini suatu kebijakan yang sangat bisa dimanfaatkan WP untuk segera menunaikan kewajiban pajaknya karena semua sanksi administrasi pajak daerah dihapus untuk periode pembayaran pokok pajak selama periode empat bulan ke depan," ujar Bambang dalam keterangannya, Jumat (16/9).

Dia membeberkan, ada

tiga kategori penghapusan sanksi administrasi pajak daerah dalam kebijakan tersebut. Kategori ini yakni penghapusan bunga atas keterlambatan pembayaran pokok, penghapusan bunga atas surat tagihan pajak daerah (STPD) yang tidak atau kurang dibayar, dan penghapusan denda atas keterlambatan pendaftaran.

Adapun kebijakan itu diterapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Nomor 1588 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah. "Kebijakan ini sebagai bentuk upaya pemulihan ekonomi nasional pasca-bencana non-alam wabah Covid-19 di DKI Jakarta, percepatan target penerimaan, dan stimulus kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam hal tertib administrasi pembayaran pajak daerah," kata Bambang. ● yan

Tol Becakayu Beroperasi Penuh Sebentar Lagi, Ini Daftar Ruasnya

JAKARTA (IM) - Sejumlah ruas Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Tol Becakayu) telah dilakukan Uji Laik Fungsi (ULF) dan Uji Laik Operasi (ULO) pada bagian Ramp Prumpung, On Ramp Casablanca (Looping Pasar Gembong) dan koneksi sisi Timur Jalan Tol Wiyoto Wiyono ke Jalan Tol Becakayu.

Saat ini Jalan Tol Becakayu memiliki dua seksi yaitu seksi 1 Kasablankajaka Sampurna sepanjang 11,9 kilometer (km) dan sudah beroperasi. Lalu seksi 2a Jaka Sampurna-Kayuringin sepanjang 4,12 km dan seksi 2a Ujung Kayuringin-Margajaya telah mencapai progres konstruksi dan sudah 100% sehingga ditargetkan akhir 2022 siap beroperasi. Jadi total pembangunan konstruksi layang dari Bekasi sampai Kampung Melayu

adalah 16,02 km. "Dengan adanya Jalan Tol Becakayu ini waktu tempuh berkendara dari Kota Bekasi menuju Jakarta adalah 2 jam. Namun dengan jalan ini perjalanan menjadi hanya 30 menit," tulis keterangan BPJT, dikutip Jumat (16/9).

Selain itu jalan ini juga menjadi salah satu solusi untuk mengurai kepadatan lalu lintas kendaraan di Jalan Raya Kalimalang dan Tol Jakarta Cikampek karena akan mengurangi volume lalu lintas di tol Jakarta-Cikampek untuk kendaraan yang mengarah ke Bekasi atau Jakarta.

"Tol ini nantinya akan meningkatkan kelancaran lalu lintas kendaraan logistik yang menuju Bekasi, Karawang, Cibitung dan sekitarnya," ulisnya. ● yan

4 | Metropolis

FOTO/ANT



JAKARTA TERCATAT SEBAGAI KOTA PALING BERPOLUSI

Pemrov DKI Genjot 70 Strategi Pengendalian Pencemaran Udara

Ke-70 strategi tersebut masuk dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI yang saat ini dalam proses penuntasan dan ditargetkan terbit pada akhir 2022. Tujuannya, Pergub itu diharapkan mengikat pemangku kebijakan di Jakarta termasuk untuk Gubernur DKI selanjutnya.

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggenjot penerapan 70 strategi pengendalian pencemaran udara di Ibu Kota agar manfaat dan hasilnya bisa dirasakan oleh semua pemangku kepentingan serta dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

"Strategi tersebut sebagian

sudah kami kerjakan dan dilakukan berkelanjutan," kata Humas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Yogi Ikhan di Jakarta, Jumat (16/9).

Menurut dia, sebanyak 70 strategi tersebut masuk dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI yang saat ini dalam proses penuntasan dan ditargetkan terbit pada akhir 2022.

Tujuannya, lanjut dia, Pergub itu diharapkan mengikat pemangku kebijakan di Jakarta termasuk untuk Gubernur DKI selanjutnya.

Adapun 70 rencana aksi itu sebagian sudah dilakukan di antaranya peningkatan tata kelola pengendalian pencemaran udara.

Langkahnya, lanjut dia, meningkatkan inventarisasi emisi berkelanjutan, meningkatkan pemantauan dan evaluasi hingga pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencemaran udara.

Strategi lainnya yakni mengurangi pencemaran udara dari sumber bergerak di antaranya peremajaan angkutan umum, pengembangan transportasi ramah lingkungan untuk transportasi publik dan pemerintah.

Untuk transportasi ramah

lingkungan, Pemrov DKI melalui BUMD TransJakarta kini mengoperasikan 30 unit bus listrik dan target 100 unit akhir 2022.

Kemudian, penerapan uji emisi kendaraan bermotor dan pengembangan kawasan rendah emisi, meningkatkan infrastruktur untuk mendukung kesadaran menggunakan transportasi umum hingga manajemen rekayasa lalu lintas.

Strategi selanjutnya yakni pengurangan emisi dari sumber tidak bergerak di antaranya dengan memperbanyak ruang terbuka hijau, memperbanyak instalasi panel surya atap, mengendalikan polusi udara dari kegiatan industri. Untuk instalasi panel surya atap, Pemrov DKI sebelumnya melakukan efisiensi energi di antaranya dengan membangun 124 panel surya di fasilitas pemerintah yakni rumah sakit dan sekolah.

Adapun energi listrik yang dihasilkan dari 124 panel surya itu mencapai 11 megawatt.

Rencananya, tahun ini DKI fokus pada peningkatan fasilitas di 28 RSUD lebih ramah lingkungan itu memanfaatkan alokasi APBD 2022.

"Upaya itu tidak bisa satu dua tahun tapi kami memastikan itu berkesinambungan, jangka panjang minimal 2030," ucap Yogi.

Kota Paling Berpolusi

Lembaga data kualitas udara IQ Air menempatkan Jakarta sebagai peringkat pertama dari sepuluh besar kota paling berpolusi di Indonesia dengan indeks kualitas udara di angka 180 pada Senin, 18

REVITALISASI HALTE TRANSJAKARTA

Pekerja menyelesaikan proyek revitalisasi Halte TransJakarta di Kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (16/9). Proyek tersebut merupakan bagian dari proyek revitalisasi 46 halte TransJakarta yang dimulai sejak April 2022 dimana desainnya akan lebih ramah terhadap para penyandang disabilitas.

Relokasi Pipa di Proyek MRT, Suplai Air 10 Kelurahan DKI Terhenti Sementara

JAKARTA (IM) - PAM Jaya dan Palyja akan melakukan relokasi pipa di Jalan MH Thamrin untuk pembangunan MRT Jakarta fase 2A. Pekerjaan ini akan berdampak pada pasokan air di sejumlah wilayah pelayanan Palyja.

Berdasarkan informasi dari akun instagram @pamjaya_id, kegiatan relokasi pipa akan berlangsung pada 16-17 September 2022 mulai pukul 21.00-05.00 WIB.

"Pekerjaan ini akan berdampak pada pasokan air di

wilayah pelayanan Palyja pada 16-17 September 2022," demikian keterangan yang disampaikan @pamjaya_id seperti dilihat, Jumat (16/9).

Suplai air di sepuluh kelurahan bakal terhenti imbas pemindahan pipa tersebut. Rinciannya yaitu Kelurahan Kebon Kacang, Kampung Bali, Petojo Selatan, Gambir, Gondangdia, Cikini, Kebon Sirih, Menteng, Ancol dan Penjaringan.

Sedangkan, kelurahan yang suplai airnya berkurang yaitu Kelurahan Kebon Kelapa,

Maphar, Taman Sari, Kartini, Karang Anyar, Mangga Besar, Mangga Dua Selatan, Tangki, Roa Malaka, Pademangan, Penjaringan dan Pekojaan.

"MRT Jakarta, PAMJAYA dan Palyja memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat dari proses relokasi pipa distribusi air ini," ujarnya. ● yan

Dalam Kurun Tiga Bulan, 3.510 Warga Ber-KTP Kabupaten Bekasi Peroleh Pekerjaan

CIKARANG PUSAT (IM) - Dalam kurun waktu 3 bulan sejak dibentuk, Tim Koordinasi Penanggulangan Pengangguran (TKPP) Kabupaten Bekasi telah berhasil membantu penyerapan tenaga kerja sebanyak lebih dari 14 ribu orang ke perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bekasi. Dari jumlah tersebut, 3.510 di antaranya adalah tenaga kerja lokal ber-KTP Kabupaten Bekasi. Jumlah ini melampaui target TKPP Kabupaten Bekasi yang memiliki target sebanyak 3.000 tenaga kerja lokal yang diserap oleh perusahaan dalam kurun waktu 3 bulan.

Untuk melanjutkan keberhasilan, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menyiapkan beberapa upaya untuk dapat memenuhi target penyerapan tenaga kerja lokal di Kabupaten Bekasi. Dalam Rapat TKPP, Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan menjelaskan langkah pertama yang dijalanannya yaitu dengan mencari data serta informasi lowongan pekerjaan yang akan dibuka oleh perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bekasi. Data tersebut nantinya akan dikumpulkan oleh Pemkab Bekasi agar dapat disebarluaskan melalui media-media yang dimiliki dan melalui pelaksanaan job fair.

"Pertama kita tugaskan bidang penempatan untuk mengumpulkan data lowongan kerja, karena ini merupakan kewajiban perusahaan untuk menyampaikan data tersebut. Nanti datanya bisa disebarluaskan ke masyarakat



Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan (kanan).

melalui media-media yang dimiliki dan bisa juga melalui jobfair," jelasnya dalam rilis Prokopim Setdakab Bekasi, Jumat (16/9).

Dari data tersebut, Pemkab akan menyelaraskan kompetensi serta keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan dengan Balai Latihan Kerja Kabupaten Bekasi (LPK), Lembaga Pelatihan Kerja, serta sekolah kejuruan, sehingga para pencari kerja asal Kabupaten Bekasi telah memiliki kompetensi dan keahlian sesuai yang dibutuhkan.

"Kepada bidang pelatihan, data dengan kompetensi yang dibutuhkan tadi segera koordinasikan dengan Balai Latihan Kerja, LPK, dan SMK untuk bisa menyiapkan para pencari kerja sesuai kebutuhan kompetensinya," lanjutnya.

Selanjutnya, ia turut memperhatikan kesejahteraan pekerja di perusahaan-

kan upah. Langkah-langkah koordinasi dan komunikasi harus dijalankan dari sekarang," ucapnya.

Selain itu, Pemkab Bekasi juga akan berupaya menanggulangi pengangguran dengan memberikan pelatihan kewirausahaan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinas KUKM). Ia juga ingin ada pengawasan kepada alumni pelatihannya sampai benar-benar berhasil membuka usahanya sendiri.

"Jadi pengangguran ini bukan hanya diserap dan disalurkan ke perusahaan, tapi ada kewirausahaan juga yang dibangun. Oleh karena itu, ada pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan Dinas KUKM dan harus sampai pengawasan sehingga alumuninya betul-betul bisa membuka usaha," terangnya.

"Untuk pekerja yang sudah bekerja juga perlu dilindungi kesejahterannya, terutama menghadapi tuntutan kenai-

Terakhir, ia mendapatkan masukan dari Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi untuk dapat menerbitkan Peraturan Bupati Bekasi terbaru guna mendukung Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja lokal. Ia memerintahkan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi untuk segera membentuk tim agar dapat menerbitkan Peraturan Bupati Bekasi tersebut dengan target sebelum akhir tahun 2022.

"Terakhir, dari komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi ternyata selama ini Pemkab belum jalankan Perda secara detail karena Perbup-nya hanya satu yang terbit, padahal dibutuhkan banyak Perbup agar bisa menjalankan Perda dengan maksimal," tuturnya. ● mdl

PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan bahwa para pemegang saham PT MAJALENGKA TELEVISI UTAMA, berkedudukan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ("Perseroan"), bermaksud mengalihkan saham dalam Perseroan yang menyebabkan terjadinya perubahan pengendalian dalam Perseroan. Kepada para kreditor yang keberatan atas pengalihan saham tersebut dapat mengajukan keberatan melalui surat tercatat disertai bukti-bukti yang sah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini yang ditujukan kepada alamat di bawah ini:

PT MAJALENGKA TELEVISI UTAMA
Jalan Mutara No.52 RT.04 RW.07,
Kelurahan Rajagaluh Lor,
Kecamatan Rajagaluh,
Kabupaten Majalengka,
Provinsi Jawa Barat 45472
Up: Direksi

Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Majalengka, 17 September 2022
Direksi PT Majalengka Televisi Utama

PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan bahwa para pemegang saham PT KUNINGAN TELEVISI UTAMA, berkedudukan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ("Perseroan"), bermaksud mengalihkan saham dalam Perseroan yang menyebabkan terjadinya perubahan pengendalian dalam Perseroan. Kepada para kreditor yang keberatan atas pengalihan saham tersebut dapat mengajukan keberatan melalui surat tercatat disertai bukti-bukti yang sah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini yang ditujukan kepada alamat di bawah ini:

PT KUNINGAN TELEVISI UTAMA
Jalan Raya Windujanten No.31,
Kelurahan Windujanten,
Kecamatan Kadugede
Kabupaten Kuningan,
Provinsi Jawa Barat 45561
Up: Direksi

Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kuningan, 17 September 2022
Direksi PT Kuningan Televisi Utama

PENGUMUMAN KEHILANGAN SURAT KOLEKTIF SAHAM

Berdasarkan surat tanda penerimaan laporan kehilangan dari Kepolisian Sektor Cimanggung No. STPLKBS/1216/C/10/2022/Sektor, tanggal 15 September 2022, dengan ini diumumkan bahwa telah hilang Surat Kolektif Saham PT. Sunson Textile Manufacturer Tbk, atas nama Gracotine Margati Wirata yaitu: 1) No. Sks Awal 19990037053 - No. Sks Akhir 19990037152; No. Seri Awal 558391001 - No. Seri Akhir 558441000, Jumlah 100 Sks dan 50.000 Saham; 2) No. Sks Awal 19990037373 - No. Sks Akhir 19990037352, No. Seri Awal 558551001 - No. Seri Akhir 558651000, Jumlah 160 Sks dan 80.000 Saham; 3) No. Sks Awal 19990037543 - No. Sks Akhir 19990037552, No. Seri Awal 558650001 - No. Seri Akhir 558641000, Jumlah 10 Sks dan 5.000 Saham, total 270 Sks dan 135.000 saham.

Bagi yang menemukan hubungi: PT. Sunson Textile Manufacturer Tbk. dengan Tlpn (022) 7798289